

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Legi Mugiarty

Hamzah Ritchi

Arie Pratama

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
hamzah.ritchi@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan barang milik Negara, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang milik Negara dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik Negara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan suatu *Survey*. Populasi sasaran yang diteliti adalah 147 Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Kepala Satuan Kerja dan Petugas Barang Milik Negara sebagai responden. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sensus. Metode analisis data menggunakan *Covariance-Based Structural Equation Model (CB-SEM) tools LISREL* versi 8.70.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan barang milik negara, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan barang milik negara, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan barang milik negara.

Kata Kunci : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan

Pendahuluan

Perkembangan sektor publik dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Artinya Pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan keuangan pemerintah Pusat (UU No 17 Tahun 2003).

Dalam hal ini Kementerian PUPR melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan setiap tahunnya mendapatkan opini dari BPK. Opini Kementerian PUPR dari 2011 sd 2015 mengalami perkembangan. Tahun 2011 mendapat opini WDP, Tahun 2012 meningkat WTP-DPP, tahun 2013 Kementerian PU berhasil meraih opini WTP. Walaupun sempat meraih opini WTP, namun hal ini tidak terlepas dari masalah terkait temuan barang milik negara. Kemudian pada tahun 2014 mendapat opini WTP-DPP, dan di Tahun 2015 opini turun kembali menjadi WDP.

Ali Masykur Musa (2013) mengatakan bahwa kualitas pertanggungjawaban keuangan tercermin dari Opini BPK terhadap laporan keuangan entitas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Adhi dan Suhardjo, 2013)

Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, salah satu yang menjadi temuan berulang-ulang dari tahun 2011-2015 dalam kelemahan Sistem Pengendalian Intern yaitu pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib dan dalam pemantauan hasil tindak lanjut BPK temuan tersebut belum sesuai atau selesai. Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air belum melakukan pengelolaan dan penatausahaan secara menyeluruh atas aset yang menjadi milik atau yang berada didalam pengelolaannya (Sumber:Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR). Hal ini diperkuat Ketua BPK, Harry Azhar Azis bahwa Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, laporan BMN yang berkualitas dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Permasalahan terkait dengan sumber daya manusia yaitu petugas SIMAK BMN/aset tetap belum melakukan pencatatan dan pengelolaan aset tetap secara optimal. Permasalahan tentang pengelolaan aset saat ini salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang pengelolaan BMN (www.perbendaharaan.go.id). Sumber daya manusia yang sangat beragam sedangkan standarisasi pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN diperlukan SDM yang andal, di samping harus mengerti konsep dan filosofi BMN, baik pada saat inventarisasi pengamanan maupun pada saat memasukkan data ke dalam sistem perangkat lunak BMN (www.pu.go.id).

Selain sumber daya manusia yang kompeten, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan barang adalah teknologi informasi berupa sistem aplikasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi komputer untuk mempermudah penyusunan laporan BMN yaitu SIMAK BMN.

Dahulu banyak sistem informasi yang gagal karena sistemnya, namun dewasa ini sistem informasi banyak gagal karena aspek perilaku dari penggunanya (Jogiyanto, 2008).

Model *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi. TAM ini dikemukakan oleh Davis (1989) yang mengembangkan kerangka pemikiran tentang minat pemanfaatan teknologi informasi. TAM banyak digunakan untuk

memprediksi tingkat akseptasi pemakai dan pemakaian yang berdasarkan persepsi terhadap kegunaan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi.

Untuk pemanfaatan teknologi informasi di Ditjen SDA terdapat permasalahan dan tercatat dalam temuan BPK yaitu sistem aplikasi penyusutan dan penerapannya belum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan barang milik negara, untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang milik negara dan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik Negara pada satuan kerja Ditjen SDA.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan dapat terjadi dalam organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik (Zimmerman, 1977). Dalam konteks pemerintahan, rakyat bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada agen baik itu legislatif maupun

eksekutif dalam mengelola urusan publik. Menurut teori agensi, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan rakyat sehingga timbul asimetri informasi. Hal ini yang terkadang dapat memicu tindakan korupsi oleh agen. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya mengurangi asimetri informasi (Setiawan. 2012: Agusti 2014).

Evan dan Patton (1987) mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat, sinyal yang baik bertujuan agar rakyat dapat mendukung pemerintahan yang sedang berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pemerintah akan memberikan sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lengkap. (Arifin dan Fitriyani, 2014).

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dijelaskan definisi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan (BPK, 2008).

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, *auditee* dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan/memberikan

pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat sesegera mungkin dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain dasar pelaksanaan *follow-up*, pelaksanaan *review follow-up*, batasan *follow-up*, implementasi rekomendasi, pemeriksaan kembali secara periodik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wiley dalam Warisno (2008) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

Haris (2001) dalam buku Tjutju Yuniarsih dan Suwatno (2016) kompetensi merupakan pengetahuan dasar yang pokok, kemampuan, pengalaman dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sukses.

Pengelola aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dengan mengacu kepada standar kualitas lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (*International Federation of Accountants*) yaitu IES (*International Education Standard,s* 2012). Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja, untuk menunjukkan kompetensi dapat dilihat dari beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi yaitu :

- IES 2, *Contents of Professional Accounting Education Programs*
- IES 3, *Professional Skills Contents*
- IES 4, *Professional Values, Ethics and Attitudes*

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi (Williams and Sawyer, 2007).

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat-gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. (Wilkinson, *et al.*, 2000).

Thompson, *et al.* (1991) mendefinisikan pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Berbagai teori perilaku banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Technology Acceptance Model (TAM)* diadopsi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikembangkan oleh (Davis, 1989) yang menawarkan sebagai landasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pemakai dalam penerimaan dan penggunaan sistem informasi. Pemanfaatan teknologi Informasi dapat diartikan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut (Davis, 1989)

Terdapat 5 (lima) variabel dari penelitian model TAM meliputi persepsi tentang kemudahan penggunaan, manfaat penggunaan, sikap penggunaan, kecenderungan penggunaan, dan kondisi nyata penggunaan.

Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Obyek Dan Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan (X1), Kompetensi sumber daya manusia (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap kualitas laporan barang milik negara (Y) pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Metode Penelitian, Sumber Data, Unit Analisis dan Populasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan suatu *survey*. Penelitian *survey* menurut Sugiyono (2012) adalah metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis.

Metode Analisis Data menggunakan *Covariance Based SEM tools LISREL* versi 8.70. Menurut Hair dkk sebagaimana dikutip oleh Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Kecocokan model pengukuran :
 - Validitas berhubungan apakah suatu variabel mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012)
 - Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk latennya. (Latan, 2012)
2. Kecocokan model struktural adalah generasi kedua teknik analisis multivariat yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik secara berulang untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model.
3. Kecocokan keseluruhan model : dalam tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, signifikan koefisien-koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008).

Goodness of Fit Index

Goodness of Fit Index	Cut Off Value
Chi Square (χ^2)	Semakin kecil nilainya semakin baik
Significant Probability	$\geq 0,05$
RMSEA	$\geq 0,05$ artinya <i>good fit</i>
Normed Chi-Square	Nilai yang disarankan batas bawah 1,0, batas atas 2,0 atau 3,0 dan yang lebih longgar 5,0
P-value for test of close fit	$\geq 0,05$
GFI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq GFI \leq 0,9$
AGFI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq AGFI \leq 0,9$
NFI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq NFI \leq 0,9$
NNFI/TLI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq TLI \leq 0,9$
CFI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq CFI \leq 0,9$
RFI	<i>Good fit</i> apabila $\geq 0,90$ dan <i>fit marginal</i> apabila $0,8 \leq RFI \leq 0,9$
PNFI	Semakin tinggi nilai PNFI, maka kecocokan suatu model akan semakin baik (nilai yang disarankan $\geq 0,5$)
PGFI	Semakin tinggi nilai PGFI, maka kecocokan suatu model akan semakin baik (nilai yang disarankan $\geq 0,5$)

Sumber : Ferdinand, 2000 dalam Samus, 2011

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. kuisioner dengan teknik pengukuran skala likert diberi skor 5 (selalu), 4 (sering), 3 (kadang-kadang), 2 (jarang), 1 (tidak pernah) (Sugiyono, 2012).

Unit Analisis pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan populasi dengan menggunakan teknik sensus. Sensus adalah semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012).

Populasi berjumlah 147 satuan kerja, untuk pengisian kuisioner dilakukan oleh 294 responden yang terdiri dari 147 Kepala satuan kerja untuk variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas laporan barang milik negara, sedangkan 147 Petugas BMN untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi

Operasional Variabel

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (Mardiasmo, 2009) dengan dimensi : Dasar pelaksanaan *follow-up*, Pelaksanaan *review follow-up*, Batasan *follow-up*, Implementasi rekomendasi dan Pemeriksaan kembali secara periodik.
2. Kompetensi sumber daya manusia (*International Education Standards*,

- 2012) dengan dimensi : Pengetahuan, Keahlian dan Sikap.
3. Pemanfaatan teknologi informasi (Davis, 1989 dalam Sufa'atin 2014) dengan dimensi : Kemudahan penggunaan, Manfaat penggunaan, Sikap penggunaan, Kecenderungan penggunaan, dan Kondisi nyata penggunaan.
4. Kualitas laporan barang milik megara (PP No. 71 Tahun 2010) dengan dimensi : relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

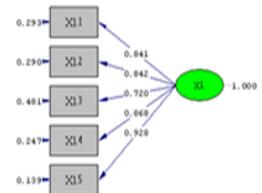
Hasil Penelitian

Pengolahan Data Penelitian meng-gunakan *Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) tools LISREL* versi 8.70

1. Kecocokan model pengukuran untuk menguji validitas dan uji reliabilitas dalam SEM

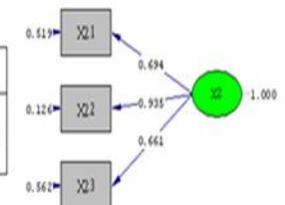
CFA konstruktur XI

Variabel manifest	λ	λ^2	e	CR	VE
X1.1	0,841	0,707	0,293	0,924	0,710
X1.2	0,842	0,709	0,291		
X1.3	0,720	0,518	0,482		
X1.4	0,868	0,753	0,247		
X1.5	0,928	0,861	0,139		

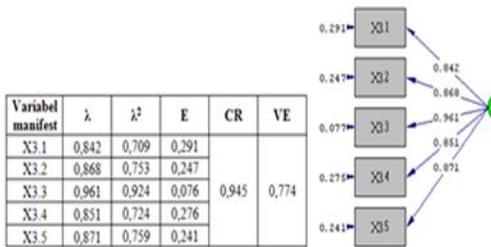


CFA konstruktur XII

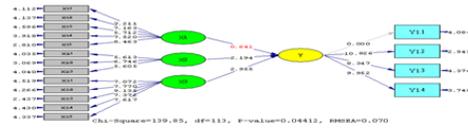
Variabel manifest	λ	λ^2	e	CR	VE
X2.1	0,694	0,482	0,518	0,813	0,598
X2.2	0,935	0,874	0,126		
X2.3	0,661	0,437	0,563		



CFA konstruk X3]

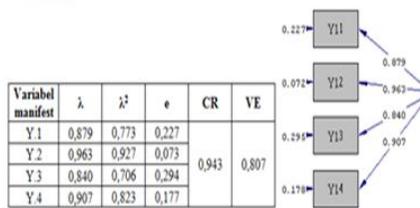


Model Struktural (t-value)



Persamaan Model Pengukuran Variabel X1, X2, X3 dan Y

CFA konstruk Y



Indikator Eksogen	Konstruk Eksogen			Kekeliruan (Error)	t- hitung
	ξ_1	ξ_2	ξ_3		
X1.1	= 0,844 ξ_1			+	0,288 7,211
X1.2	= 0,840 ξ_1			+	0,294 7,163
X1.3	= 0,719 ξ_1			+	0,483 5,712
X1.4	= 0,866 ξ_1			+	0,25 7,520
X1.5	= 0,929 ξ_1			+	0,136 8,463
X2.1		= 0,732 ξ_2		+	0,464 5,613
X2.2		= 0,836 ξ_2		+	0,3 6,746
X2.3		= 0,731 ξ_2		+	0,465 5,605
X3.1			= 0,828 ξ_3	+	0,314 7,072
X3.2			= 0,878 ξ_3	+	0,229 7,770
X3.3			= 0,963 ξ_3	+	0,072 9,135
X3.4			= 0,858 ξ_3	+	0,277 7,372
X3.5			= 0,868 ξ_3	+	0,247 7,617

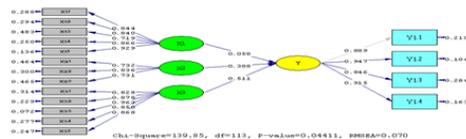
Dari gambar diatas menyatakan bahwa dari semua variabel manifest pada konstruk X1, X2, X3 dan Y memiliki *factor loading* (λ) $\geq 0,5$, hal ini menunjukkan untuk uji validitas semua variable manifest adalah valid. Sedangkan Nilai CR $> 0,7$ dan VE $> 0,5$, menunjukkan untuk uji reliabilitas bahwa konstruk X1, X2, X3 dan Y adalah reliabel.

Indikator endogen	Konstruk endogen		Kekeliruan (Error)	t- hitung
	η_1			
Y.1	= 0,889 η_1	+	0,210	-
Y.2	= 0,947 η_1	+	0,104	10,826
Y.3	= 0,846 η_1	+	0,284	8,347
Y.4	= 0,915 η_1	+	0,163	9,952

2. Kecocokan model struktural
Kecocokan model struktural untuk menggambarkan sebaik apa indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa model persamaan pengukuran menjelaskan hubungan variabel laten dengan variabel manifestnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh nilai koefisien bobot memiliki arah hubungan positif.

Model Struktural (Standardize)



Uji signifikansi kontribusi masing-masing variabel manifest terhadap variabel laten bisa dilihat dari nilai t-hitung. Variabel manifest dikatakan memiliki nilai kontribusi yang bermakna jika memiliki nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan t-kritis ($\pm 1,96$). Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa nilai t-hitung untuk semua indikator lebih besar ($\pm 1,96$) dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Hal ini menunjukan semua indikator signifikan dalam merefleksikan variabel laten.

3. Kecocokan keseluruhan model untuk mengecek apakah hasil olahan data penelitian sesuai dengan model penelitian

$$Y = 0.0579 \cdot X_1 + 0.388 \cdot X_2 + 0.511 \cdot X_3, \text{Errorvar} = 0.265, R^2 = 0.735$$

(0.0903)	(0.177)	(0.173)	(0.0815)
0.641	2.194	2.955	3.254

Goodness of Fit Pengujian Model Penelitian

Indikator Fit	Nilai yang Direkomendasikan	Evaluasi Model	Hasil Penelitian
Absolute Fit			
Probabilitas	$p \geq 0,05$	Tidak Signifikan	0,000
	≤ 2	Over Fitting	1,238
Normed Chi-Square (χ^2/df)	$2 \leq \chi^2/df \leq 5$	Good Fit	
	$\leq 0,10$	Good Fit	
RMSEA	$\leq 0,05$	Very Good Fit	0,067
	$\leq 0,01$	Outstanding Fit	
P-value for test of close fit	$\geq 0,05$	Good Fit	0,214
GFI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,749
AGFI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,660
Comparative Fit			
NFI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,882
NNFI/TLI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,935
CFI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,946
RFI	$\geq 0,90$	Good Fit	0,858
Parsimonious Fit			
PNFI	$\geq 0,5$	Lebih besar lebih baik	0,733
PGFI	$\geq 0,5$	Lebih besar lebih baik	0,533

Berdasarkan pengujian kesesuaian model dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas, *normed chi-square* dan AGFI menunjukkan model tidak fit artinya tidak ada kesesuaian antara hasil olahan data penelitian dengan model penelitian. Probabilitas *chi-square* sangat bersifat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil maupun yang terlalu besar. Oleh karenanya pengujian ini perlu dilengkapi dengan alat uji lainnya.

Dan hasil tabel diatas, nilai-nilai *goodness-of-fit* tersebut menunjukan bahwa secara keseluruhan model yang digunakan dalam penelitian menghasilkan tingkat kesuaian model yang sangat baik, karena hasil pengukuran tingkat kesesuaian model memenuhi nilai yang disarankan.

Pengujian Hipotesis

Persamaan model pengukuran untuk variabel X1, X2, X3 dan Y menyajikan output pengolahan data untuk evaluasi model struktural, dari tabel tersebut dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis penelitian ini dengan LISREL adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Koefisien variabel laten eksogen tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap variabel laten endogen kualitas laporan barang milik negara sebesar 0,0579 dengan arah positif, menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kualitas laporan barang milik negara. Nilai t-hitung 0,641 lebih rendah dari batas kritis yang ditentukan yaitu 1,96, sehingga H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan barang milik negara.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Koefisien variabel laten eksogen kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel laten endogen kualitas laporan barang milik negara sebesar 0,388 dengan arah positif, menunjukkan hubungan yang rendah antara kompetensi sumber daya manusia dengan Kualitas laporan barang milik negara. Nilai t-hitung 2,194 lebih besar dari batas kritis yang ditentukan yaitu 1,96, sehingga H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang milik negara.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Koefisien variabel laten eksogen Pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel laten endogen kualitas laporan barang milik negara sebesar 0,511 dengan arah positif,

menunjukkan hubungan yang sedang antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan barang milik negara. Nilai t-hitung 2,955 lebih besar dari batas kritis yang ditentukan yaitu 1,96, sehingga H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik Negara.

Pembahasan

Pembahasan Hasil Pengujian Indikator

Tujuan peneliti menggunakan metode analisis data *Covariance Based SEM* (CB-SEM) yaitu untuk mengetahui dimensi mana yang paling berkontribusi dari setiap variabel laten.

Untuk variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan indikator yang paling berkontribusi yaitu pemeriksaan kembali secara periodik (0,928). Peneliti melihat dari tanggapan responden yang memiliki prosentase paling tinggi yaitu Pimpinan dan petugas BMN melihat LHP sebelumnya agar terhindar/tidak terjadi temuan berulang, artinya setiap organisasi dapat mengalami peningkatan atau penurunan, untuk mengantisipasi agar tidak mengalami penurunan dengan adanya temuan tahun lalu tidak menjadi temuan berulang pada tahun berikutnya, maka pimpinan dan petugas selalu belajar/melihat dari LHP sebelumnya.

Untuk variabel kompetensi sumber daya manusia indikator yang paling berkontribusi yaitu keahlian (0,935). Peneliti melihat dari tanggapan responden yang memiliki presentase paling tinggi yaitu petugas menggunakan keahlian intelektual dalam menjalankan tugas sehari-hari artinya petugas mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan beragam permasalahan dengan menggunakan kumpulan fakta yang komprehensif, pola pikir induktif dan aspek logika.

Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi indikator yang paling berkontribusi yaitu sikap penggunaan (0,961) Peneliti melihat dari tanggapan responden yang memiliki prosentase paling tinggi yaitu petugas akan merasa dalam pengoperasian SIMAK BMN merupakan tantangan yang harus dihadapi, maka apabila menemukan kendala saudara akan terus berusaha mengerjakan. Artinya petugas dalam mengoperasikan SIMAK BMN, sikap yang ditunjukkan terhadap penggunaan sistem berarti menerima aplikasi tersebut dan merupakan suatu tantangan dalam mengerjakannya, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, tetapi petugas terus berusaha untuk menyelesaikannya.

Untuk variabel kualitas laporan BMN indikator yang paling berkontribusi yaitu andal (0,963). Peneliti melihat dari tanggapan responden yang memiliki prosentase paling tinggi yaitu memverifikasi terlebih dahulu pada dokumen pendukung (SP2D, SPK, Faktur dll), sebelum disajikan dalam laporan BMN. Artinya informasi yang disajikan dalam laporan BMN dapat diuji kebenarannya, informasi dalam laporan BMN sesuai dengan dilapangan/dokumen sumber yang ada dengan melakukan tahapan pengujian dilakukan lebih dari sekali atau diverifikasi oleh pihak yang berbeda.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN. Sesuai fenomena pada Bab I bahwa masih terdapat TLHP dari tahun 2011 sd 2015 belum selesai/sesuai artinya masih belum direspon sepenuhnya oleh pimpinan dan petugas. Untuk menemukan lokasi untuk mencari bukti temuan asset (barang/dokumen) pada

tahun lalu yang sulit didapat/tidak menemukan, sedangkan asset yang berumur lebih dari satu tahun harus dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh pimpinan/petugas yang mengurus asset/barang tersebut. Asset perlu didata dan dicatat secara lengkap termasuk informasi tentang nilai. Kendala lainnya yaitu batas waktu penyelesaian tindak lanjut, pada saat banyak temuan asset yang harus ditindaklanjuti, maka pimpinan dan petugas membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya tindak lanjut. Selain itu, masih sering terdapat Temuan BMN yang sudah ditindaklanjuti ditahun sebelumnya kembali menjadi obyek pemeriksaan ditahun berikutnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Agustin (2014) dan Nurdiono dkk (2015) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap opini.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN. Hasil tanggapan responden, Kompetensi SDM sudah baik, namun kenyataannya dilihat dari pengelompokan data petugas BMN menurut latar belakang/jurusan pendidikan, kebanyakan petugas memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi, sebaiknya yang membuat, menyajikan dan menyusun laporan BMN adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan dan ahli di bidang akuntansi untuk menghasilkan laporan BMN yang berkualitas, petugas juga harus harus mengerti, memahami dan bisa menjelaskan isi dari Laporan Barang Milik Negara dan masih terdapat petugas yang masih belum memahami tentang teknologi informasi dalam proses pengelolaan BMN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darno (2012) dan Haryanto (2013) yang menyimpulkan bahwa

kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan asset. Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Nurillah (2014) dan Rizal (2015) yang menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN. Hasil tanggapan responden, Pemanfaatan teknologi informasi sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, dilihat dari kemudahan pengguna bahwa tidak semua pegawai dapat mengoperasikan SIMAK BMN, artinya selain diperlukan pengetahuan dalam pengklasifikasian BMN, diperlukan pembelajaran terus menerus untuk dapat mengoperasikan SIMAK BMN. Petugas juga harus memahami kegunaan dan fungsi dari fitur-fitur yang ada dalam SIMAK BMN. Selain itu, petugas memerlukan durasi waktu yang cukup lama dalam menggunakan SIMAK BMN.

Penelitian Darno (2012) dan Haryanto (2013) yang menguatkan pendapat bahwa kualitas laporan barang dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang/aset. Hasil penelitian dari Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013), Zuliarti (2012), Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin (2011), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), serta Nurillah (2014) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan barang milik negara.
2. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan barang milik Negara.
3. Secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan barang milik Negara

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 - a. Diperlukan tim pelaksana untuk menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang terjadi, agar optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan TLHP tersebut selesai dan sesuai.
 - b. Diperlukan adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala satuan kerja, petugas dan pemeriksa internal dan eksternal agar tindak lanjut dapat diselesaikan dan sesuai.
 - c. Diperlukan lemari khusus untuk menyimpan semua dokumen/bukti tindak lanjut asset tahun lalu agar tersusun rapih dan mudah pada saat dicari/diperlukan. Selain itu, pada saat pergantian personil pegawai, diharapkan petugas yang lalu agar memberitahukan pada petugas sekarang tempat menyimpan semua dokumen/bukti

tindak lanjut asset tahun lalu, agar petugas yang sekarang tidak kesulitan untuk memperoleh dokumen/bukti tindak lanjut tersebut.

- d. Petugas dan pimpinan agar memperhatikan batasan waktu yang telah diberikan pemeriksa dengan cara membuat perencanaan terlebih dahulu dan membagi tugas dengan petugas lain agar dapat meminimalisir waktu yang terbatas
- e. Diperlukan adanya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN, agar dalam menjalankan aplikasi SIMAK BMN tidak salah. Pada pelatihan tersebut buat soal studi kasus lalu diimplementasikan dalam SIMAK BMN agar petugas tersebut bisa memilah-milah pengklasifikasian BMN. punya kemauan untuk terus belajar agar dalam mengoperasikan SIMAK BMN tidak menemukan kendala. Petugas juga harus paham dan mempelajari tentang IT sehingga pada saat aplikasi *error* petugas dengan cepat dapat memperbaikinya.
- f. Diperlukan adanya penghargaan dari pemeriksa dan instansi bagi Petugas BMN untuk memotivasi untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih semangat dalam bekerja. Selain itu, diperlukan perhatian, dukungan, fasilitas dari pimpinan yang diperlukan petugas untuk menunjang kinerja petugas BMN
- g. Diharapkan mampu menambahkan jumlah pegawai yang dimiliki kompetensi lebih dibidang akuntansi, mengingat dalam pengelompokan responden menurut jurusan pendidikan lebih banyak jurusan pendidikan non akuntansi dibandingkan akuntansi.

- h. Diperlukan rotasi pegawai agar petugas tidak jenuh dalam bekerja agar bisa memiliki pengalaman disemua bidang dan petugas lain juga bisa belajar tentang pengelolaan BMN
2. Untuk penelitian selanjutnya
- Penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan metode *interview* atau wawancara langsung selain dengan kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
 - Dengan penelitian yang sama, untuk penelitian selanjutnya mencoba menambah populasi, indikator, dimensi dan metode analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya agar dapat dilihat perbandingan hasil analisisnya.
 - Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variable baru/mengganti salah satu variable dengan variable yang lain/dengan penelitian yang sama, dapat menambah rumusan masalah dengan variable secara simultan sehingga akan memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.
- apabila responden tidak jujur dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Selain itu, ada kemungkinan responden yang kurang memahami maksud dari pernyataan yang ada dalam kuesioner sehingga dapat memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan maksud pernyataan.
- Pernyataan dalam kuesioner masih terlalu umum sehingga masih kurang mampu untuk menggali persepsi responden tentang variabel dalam penelitian ini.
 - Untuk pernyataan pada kuisisioner yang terdiri dari variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas laporan barang milik negara yang mengisi hanya satu responden yaitu Kelapa satuan kerja per satuan kerja, sedangkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang mengisi hanya satu responden yaitu Petugas BMN per satuan kerja
 - Pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki variabilitas karena disetiap satuan kerja Ditjen SDA menggunakan sistem dan manfaat yang sama.

Daftar Pustaka

- Adhi dan Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas laporan keuangan. Jurnal STIE Semarang.
- Agustin, A. F. 2014. Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Ali Masykur Musa. 2013. Melalui www.bpk.go.id/news/opini-wtp-untuk-laporan-keuangankementerian-pu

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antara lain :

- Tingkat pengembalian kuesioner tidak dapat 100% dikarenakan dalam penyebaran kuisisioner dilakukan responden sedang bekerja dan pada saat itu responden sedang dihadapkan konsolidasi penyusunan laporan keuangan semester I
- Penelitian ini menggunakan metode kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara lisan sehingga peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden

- Arifin, I., dan Fitriyani, D., 2014. Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. Panduan Manajemen Pemeriksaan Tahun 2008. Jakarta : BPK RI
- Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Simposium Nasional Akuntansi XIII
- Darno. 2012. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)
- Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Evans, J dan Patton. J. 1987. *Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting*. *Journal of Accounting Research* 25. pp. 130-158.
- F. D. Davis, *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*, vol. 13, pp. 319-340, 1989.
- Haryanto. 2013. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: UNDIP Press Semarang
- International Accounting Education Standards Board*. 2012. *Handbook of Pronouncement Of International Accounting Education Standards Board per 2014*.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Latan, H. 2012. *Structural Equation Modeling: Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.80*. Bandung: Alfabeta.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2015
- Mardiasmo. 2002-2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Muhamad Nuryanto & Nunuy Nur Afiah. 2013. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province-Indonesia)*. *World Review of Business Research*. Volume 3 No.4, page 157-171.
- Nurillah, As Ayifa, 2014, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pramudiarta, Rizal. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Di Kota Semarang), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Setiawan, W., 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Sufa'atin dkk. Penilaian Kualitas Perangkat Lunak Dan Penerimaan Penggunaan Terhadap Perangkat Lunak Menggunakan Faktor Kualitas Perangkat Lunak Mc Call Model Dan Technology Acceptance Model (TAM). Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, UNIKOM Bandung. ISSN: 1979-911X
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Vol XI, No. 1 –2014
- Thompson, Ronald L, Haggings, Christopher A,m dan Howel, Jane M. 1991. Personal Computing : Toward a Conceptual Model of Utilization. *Mis Quarterly*, pp. 125-143.
- Tjutju Yuniarsih & Suwatno. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta.
- Warisno. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wijanto, S.H. 2008. *Structural Equation Modeling* dengan LISREL 8.80: Konsep dan Tutorial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On- Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.*
- Williams, B. K., & Sawyer, S. C. 2007. *Using Information Technology: Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi. Edisi 7.* Terjemahan Nur Wijayaning Rahayu & Th. Arie Prabawati. Yogyakarta: ANDI
- www.perbendaharaan.go.id
- www.pu.go.id
- Zimmerman. J. 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research.* Vol. 15. pp. 107-155.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan

Pengendalian Intern Akuntansi
Terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Pemerintah
Kabupaten Kudus). Fakultas
Ekonomi Universitas Muria Kudus